

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Manfaat Penyusunan Rencana strategis, dan Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

I. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis ini adalah merupakan langkah awal untuk pelaksanaan dan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan Informatika dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat proses modernisasi menuju terwujudnya masyarakat informasi (Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan (Knowledge Based Society).

Mengacu kepada PP No. 8 Tahun 2008, Bab IV Pasal 25 ayat 2 : Rencana Strategis ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya mulai Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2009 – 2013, berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013 dan bersifat indikatif. Sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008, Bab IV Pasal 26, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2009 – 2013, akan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk membeikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang komunikasi dan Informatika Tahun 2009 – 2013, dengan tujuan mewujudkan informasi yang lebih transparan, akuntabel dan jelas informasinya.

III. MANFAAT PENYUSUNAN RENSTRA

Dalam konteks organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, manfaat umum perencanaan strategis, yaitu:

1. Sebagai alat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dan seluruh jajarannya untuk membangun arah tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah.
2. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja.

3. Menciptakan rasa tanggung jawab yang mendorong komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika pada semua tingkatan.
4. Senantiasa mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai suatu organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih dimasa depan, agar eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis.
5. Menjadi alat komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama.
6. Mengembangkan sifat yang fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang dimungkinkan akan mempengaruhi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai suatu organisasi.
7. Memberikan jaminan yang konkret, jelas, dan logis, baik kepada lingkungan internal maupun eksternal, dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Membangun sifat antisipatif dan korektif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi, sehingga akan mendorong sifat proaktif dalam bergerak

IV. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan rencana strategis ini berpedoman kepada PP no.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no : PER/20/M.PAN/11/2008), sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD

Bab 3. Isu-isu strategis berbasis Tupoksi

Bab 4. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan

Bab 5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif

Bab 6. Indikator SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab 7. Penutup

Bab 1. Pendahuluan

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai: Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Manfaat Penyusunan Rencana strategis, dan Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bab 2. Gambaran Pelayanan SKPD

Pada bab ini akan dijabarkan tentang: Kondisi Umum Provinsi Sumatera Utara, Permasalahan daerah, dan Potensi daerah.

Bab 3. Isue-isue Strategis Berdasarkan Tupoksi

Bab 4. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat dasar pemikiran perumusan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang kelak dapat dipergunakan sebagai embrio visi dan misi Dinas Komunikasi dengan penambahan dan penyempurnaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Bab 5. Rencana Program Kegiatan, Indikator Kegiatan Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab 6. Indikator Kinerja yang mengacu pada Fungsi dan Sasaran RPJMD

Bab 7. Penutup

BAB - 2

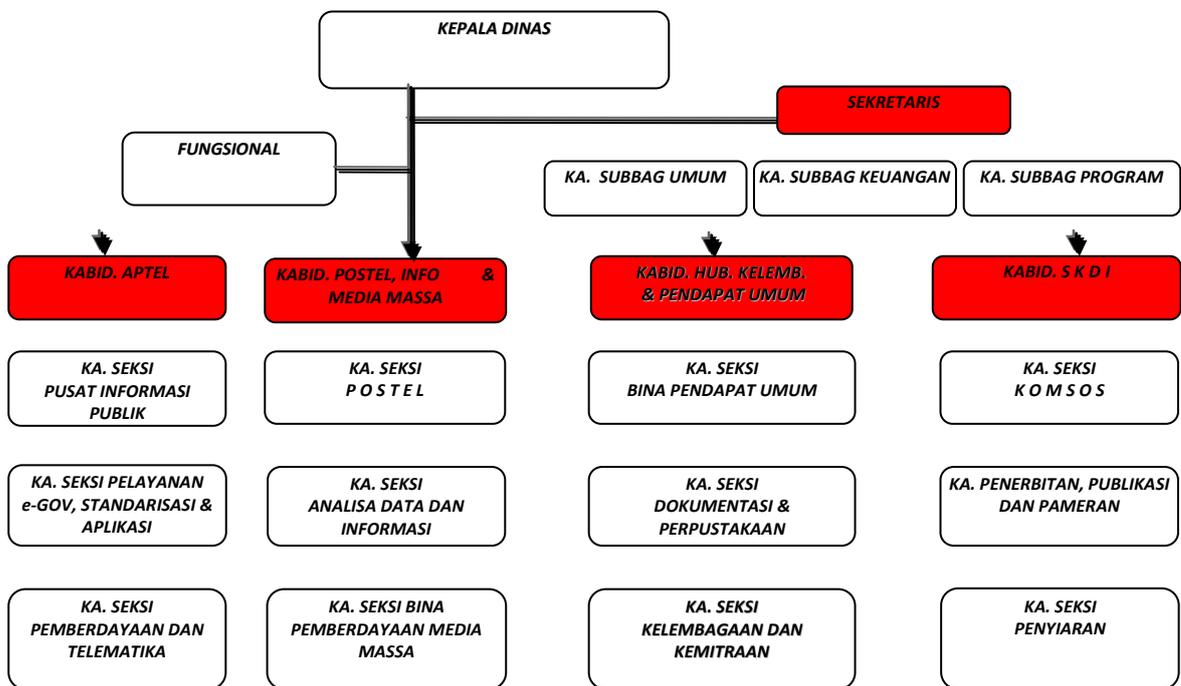
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Pada bab ini akan dijabarkan tentang kondisi umum, permasalahan daerah, dan potensi daerah dalam bidang komunikasi dan informatika.

I. KONDISI UMUM PELAYANAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kondisi umum pelayann komunikasi dan informatik, digambarkan dengan kondisi Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, yang baru dibentuk berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2009, kondisi pegawai, kondisi infrastruktur dasar pelayanan public pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

A. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



B. Kondisi Pegawai

NO	GOL	S2	S1	SARMUD	SLTA	SLTP	SD	LK	PR	JLH
1	IV-e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV-c	1	-	-	-	-	-	1	-	1
4	IV-b	1	-	-	-	-	-	1	-	1
5	IV-a	2	5	-	-	-	-	2	5	7
6	III-d	-	37	1	-	-	-	26	12	38
7	III-c	1	10	1	3	-	-	6	9	15
8	III-b	-	15	-	58	-	-	34	39	73
9	III-a	-	13	1	12	-	-	19	7	26
10	II-d	-	-	1	12	-	-	8	5	13
11	II-c	-	-	7	1	4	-	10	1	11
12	II-b	-	-	1	1	-	-	1	1	2
13	II-a	-	-	-	10	-	5	14	1	15
14	I-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	I-c	-	-	-	-	2	-	2	-	2
16	I-b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	I-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		5	80	12	97	6	5	124	80	205

C. Kondisi Infrastruktur Dasar Pelayanan Publik

No	PERALATAN	OPERASIONAL	Lokasi
1.	Web Server dan Kelengkapannya	Fasilitas Website : www.sumutprov.go.id	Kantor Gubsu
2.	Mail Server	Pengelola Surat Elektronik (e-mail) di lingkungan Pemprov	Kantor Gubsu
3.	Database Server	Media Penyimpanan Data dan Informasi Pemprov	Kantor Gubsu
4.	Web Server dan Kelengkapannya	Fasilitas Website : www.bainfokomsumut.go.id	Kantor Kominfo
5.	Media Centre	Fasilitas Internet Gratis bagi Masyarakat	Kantor Kominfo
6.	Wi Fi	Fasilitas Internet Gratis bagi Masyarakat	Kantor Kominfo & Kantor Gubsu
7.	Mobil Unit Operasional	Fasilitas Alat Siaran Keliling, Pemutaran Slide & Film serta peralatan genset	Mobile
8.	Ruang Transparansi	Ruang Pertemuan dengan kapasitas 200 tempat duduk	Kantor Kominfo
9.	Peralatan Shooting Video dan Foto	Dokumentasi Berbagai Acara Pemprov	Mobile
10.	Tabloid TRANSISI	Ekspose berita kajian berbagai program Pemprov	Kantor Kominfo
11.	Pusat Informasi Publik	4 Devisi	Kantor Kominfo

D. Institusi Ex-Officio Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

- 1. Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah – Instansi Vertikal) Provinsi Sumatera Utara**
- 2. FK-Metra (Forum Komunikasi Media Tradisional) Provinsi Sumatera Utara**

II. PERMASALAHAN DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. Letak Geografis Sumatera Utara

Letak Geografis Sumatera Utara, khususnya Pantai Timur, yang terdiri dari Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang langsung berbatasan dengan Luar Negeri dan lalu lintas laut/udara internasional melahirkan globalisasi informasi, dengan distorsi informasi, yang mempengaruhi kehidupan berpolitik, perekonomian, sosial budaya dan pertahanan/kemanaan Sumatera Utara.

Permasalahan utama adalah :

Bagaimana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempersiapkan operation mapping dengan program kegiatan yang berkualitas dan memadai kuantitasnya, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan perairan Internasional dan negara tetangga.

B. Penduduk dan Kepemerintahan Sumatera Utara

Sumatera Utara dibagi secara keperintahan menjadi 33 Kabupaten/Kota dengan 385 Kecamatan dan 5.747 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 13.201.715 jiwa (BPS 2008)

Permasalahan utama adalah :

Bagaimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyusun kebijakan dan berbagai standar operasional dan standar pelayanan minimal, dalam penyebaran informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.

C. Era Otonomi Daerah

Seiring dengan pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, kewenangan daerah diatur dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), yang mengatur tentang kewenangan pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang komunikasi dan infromatika.

Permasalahan utama adalah :

Bagaimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mengimplementasikan berbagai peraturan dan perundang-undangan dalam bidang komunikasi dan informatika menjadi peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk mendukung optimalisasi kinerja pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat Sumatera Utara

D. Lembaga Penyiaran Publik

Sesuai apa yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (LPP), PP No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI dan PP No. 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI maka TVRI dan RRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik milik pemerintah.

Permasalahan utama adalah :

Bagaimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mengatasi kondisi rendahnya Jangkauan Siar TVRI Sumut dan Blankspot di 13 Menara Pemancar Relay dan Blankspot di 9 Menara Pemancar Relay RRI Medan.

E. Lembaga Penyiaran Swasta

Sesuai apa yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, pada tahun 2008, tercatat ada 4 TV lokal, 102 Stasiun Radio Swasta yang berdiri di Sumatera Utara.

Permasalahan utama adalah :

Bagaimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mengendalikan penyebaran pertumbuhan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertumpu di wilayah perkotaan (Ibu kota Provinsi) serta kewenangan perijinan dan pemetaannya berada pada Pemerintah Pusat.

F. Asosiasi Media Cetak, TI, Periklanan, Event Organizer

Lahirnya berbagai Asosiasi bidang komunikasi dan informatika, yang mendorong percepatan pertumbuhan bidang komunikasi dan informatika di Sumatera Utara.

Permasalahan utama adalah :

Bagaimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mengendalikan penyebaran pertumbuhan berbagai Asosiasi media cetak, TI, Periklanan Event Organizer yang pertumbuhannya cukup tinggi kuantitasnya di Sumatera Utara.

G. Jaringan Telekomunikasi.

Jaringan Telekomunikasi saat ini sudah menyebar ke 385 kecamatan di Sumatera Utara. Tetapi masih terdapat blankspot di wilayah perdesaan.

Permasalahan utama adalah :

Bagaimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mendorong terbangunnya jaringan telekomunikasi ke 2.809 desa yang saat ini masih belum terjangkau jaringan.

H. Operator Telekomunikasi, Provider Menara Telekomunikasi

Saat ini tercatat 10 operator telekomunikasi dan 1.003 Menara Telekomunikasi yang menyebar di seluruh wilayah Sumatera Utara yang dibangun oleh para operator yang juga bertindak sebagai provider menara telekomunikasi.

Permasalahan utama adalah :

Bagaimana Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mendorong penyebaran menara telekomunikasi sampai ke daerah non komersil sehingga tidak terjadi hutan menara telekomunikasi di perkotaan dan daerah komersil.

III. POTENSI DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat penyatuatapan Subdis Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Kantor PDE dan Badan Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatera Utara menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Dengan penyatuatapan institusi yang menangani komunikasi dan informatika tersebut, maka penggalian potensi daerah dapat lebih dioptimalkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kekuatan mitra kerja eksternal yang berda di Sumatera Utara.

A. Dasar Hukum Teknis Operasional

Undang-Undang :

1. UU No. 6/ 1984 tentang Pos
2. UU No. 36/ 1999 tentang Telekomunikasi
3. UU No. 40/1999 tentang Pers
4. UU No. 32/2002 tentang Penyiaran
5. UU NO. 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
6. UU No. 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah :

1. PP No. 38/2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
2. PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
3. PP No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
4. PP No. 70/2001 tentang Kependidikan
5. PP No. 11/2005 tentang LPP
6. PP No. 12/2005 tentang LPP RRI
7. PP No. 13/2005 tentang LPPTVRI
8. PP No. 49/2005 tentang LP Asing
9. PP No. 50/2005 tentang LP Swasta
10. PP No. 51/2005 tentang LP Komunitas
11. PP No. 52/2005 tentang LP Berlangganan
12. PP No. 03/2007 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pemda
13. Inpres No. 3/2003 tentang Teknologi Informasi

Permen dan Keputusan Menteri :

1. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPMD No. 18/2009 – No. 07/PRT/M/2009 – 19/PER/M.Kominfo/03/ 2009 – No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Menara Telekomunikasi
2. Keputusan Menhub RI No. KM 4/2003 tentang Tata Cara Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dan Pemerintah Provinsi
3. Peraturan Menkominfo RI No. 02/PER/M,Kominfo/3/2008 tentang Pedoman dan Penggunaan Menara Bersama

Perda dan Pergub :

1. Perda Provsu No. /2009 tentang Menara Telekomunikasi Bersama
2. Perda Provsu No. 9/2008 tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
3. Pergub no. 2/2007 tentang Penataan Menara

B. Institusi Mitra Kerja Teknis Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

- 1. Institusi yang menangani Komunikasi dan Informatika Kab/Ko**
- 2. BPPI Medan – Badan Litbang Depkominfo RI**
- 3. Balmon Medan - Ditjen Postel Depkominfo RI**
- 4. KPI D Provinsi Sumatera Utara**
- 5. LPP TVRI Medan**
- 6. LPP RRI Medan, LPP RRI Sibolga dan LPP RRI Gunung Sitoli**
- 7. PRRSNI Sumatera Utara**
- 8. Kelompok Informasi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara**
- 9. Asosiasi Wartawan (PWI, AJI, IJTI) Sumatera Utara**
- 10. Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) Sumatera Utara**
- 11. Asosiasi Warnet (Awari) Sumatera Utara**
- 12. Asosiasi Piranti Lunak Indonesia (Aspiluki) Sumatera Utara**
- 13. Asosiasi Masyarakat Telematika Indonesia (Astel) Sumatera Utara**
- 14. Masyarakat Telematika (Mastel) Sumatera Utara**
- 15. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Sumatera Utara**
- 16. Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (Apjii) Sumatera Utara**
- 17. ICCA (Indonesia Congress & Convention Association) Sumatera Utara**
- 18. PPPI (Perhimpunan Perusahaan Periklanan Indonesia) Sumatera Utara**
- 19. Provider Menara Telekomunikasi**
- 20. Operator Telekomunikasi**
- 21. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Sumatera Utara**
- 22. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Sumatera Utara**
- 23. PT. Pos Indonesia dan seluruh Kantor Pos**
- 24. Perguruan Tinggi**

BAB - 3

ISSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

I. TUGAS POKOK ORGANISASI

Sesuai dengan PP nomor 41 tahun 2007, tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- a. Unsur Penunjang Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- b. Membantu Kepala Daerah dalam Bidang Komunikasi dan Informatika

II. FUNGSI ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pasal ini , Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan Nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan diseminasi informasi;
2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. Penyampaian hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Gubernur;

III. ISSUE–ISSUE STRATEGIS

Issue–issue strategis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Belum adanya operation mapping dan program khusus Bidang Komunikasi dan Informatika, bagi wilayah Pantai Timur dan pulau-pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan perairan Internasional dan negara tetangga.
2. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika, dalam diseminasi informasi bagi masyarakat yang berdiam di 33 Kabupaten/Kota dengan 385 Kecamatan dan 5.747 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 13.201.715 jiwa (BPS 2008)

3. **Belum adanya Petunjuk Pelaksanaan yang jelas dan tegas tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)**
4. **Belum ada tindak lanjut yang tegas untuk mengatasi permasalahan rendahnya Jangkauan Siar TVRI Sumut dan Blankspot di 13 Menara Pemancar Relay dan Blankspot di 9 Menara Pemancar Relay RRI Medan**
5. **Belum adanya ketegasan kewenangan daerah di dalam pengendalian penyebaran pertumbuhan Lembaga Penyiaran Swasta yang bertumpu di wilayah perkotaan (Ibukota Provinsi) serta kewenangan perijinan dan pemetaannya tetap dipertahankan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat**
6. **Belum adanya peraturan dan ketentuan yang tegas tentang pengendalian penyebaran pertumbuhan berbagai asosiasi media cetak, TI, Periklanan Event Organizer yang pertumbuhannya cukup tinggi kuantitasnya di Sumatera Utara.**
7. **Belum terbangunnya jaringan telekomunikasi ke 2.809 desa.**
8. **Pemahaman yang berbeda antara Pemerintah dan Operator Telekomunikasi, tentang Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM No. 18/2009 – No. 07/PRT/M/2009 – 19/PER/M.Kominfo/03/ 2009 – No. 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Menara Telekomunikasi, Keputusan Menhub RI No. KM 4/2003 tentang Tata Cara Hubungan Kerja antara Departemen Perhubungan dan Pemerintah Provinsi dan Peraturan Menkominfo RI No. 02/PER/M,Kominfo/3/2008 tentang Pedoman dan Penggunaan Menara Bersama, yang diimplementasikan melalui Perda Provsu No. /2009 tentang Menara Telekomunikasi Bersama.**
9. **Belum tersosialisasikannya pemberlakuan UU No. 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, yang akan dilaksanakan mulai tahun 2010 dan harus dilakukan oleh Jajaran Eksekutif dan legislatif Pemprovsu**
10. **Pemahaman yang berbeda antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan yang diatur di dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah daerah.**

- 11. Belum tersosialisasikannya, apa yang diamanatkan oleh UU No. 6/ 1984 tentang Pos, UU No. 36/ 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan UU NO. 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.**

- 12. Belum tersosialisasikannya PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PP No. 53/2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, PP No. 70/2001 tentang Kebandarudaraan, PP No. 03/2007 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pemda dan Inpres No. 3/2003 tentang Teknologi Informasi.**

- 13. Belum tersosialisasikannya Perda Provsu No. 9/2008 tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu.**

BAB - 4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat dasar pemikiran perumusan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang kelak dapat dipergunakan sebagai embrio visi dan misi Dinas Komunikasi dengan penambahan dan penyempurnaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

I. VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT INFORMASI YANG MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas didefinisikan sebagai berikut :

MASYARAKAT INFORMASI YANG MAJU :

Artinya:

1. Masyarakat mampu memilih, memilah dan memanfaatkan informasi guna meningkatkan perubahan sosial dan pembangunan ekonomi
2. Masyarakat yang memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap informasi
3. Memiliki akses Informasi sampai keruma-rumah penduduk dan membuka akses informasi kepulau-pulau terdepan.

MAJU DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBERAGAMAN :

Artinya : Masyarakat Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, hidup secara demokratis, menjunjung tinggi HAM dan dengan informasi mampu meningkatkan taraf hidup secara layak dan bermartabat serta mampu mendorong tercapainya sasaran masyarakat tidak bodoh dan punya masa depan.

II. MISI

Merealisasikan Visi dan memberikan gambaran tentang apa yang harus dilakukan serta apa yang akan dihasilkan, dirumuskan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme.

2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum.
3. Meningkatkan pelayanan informasi multi media kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika.
4. Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern.
5. Meningkatkan kualitas jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah.

III. MOTTO

Mendorong percepatan pencapaian Visi dan Missi, maka dirumuskan Motto Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

KOMUNIKASI LANCAR – INFORMASI CEPAT DAN BENAR

IV. TUJUAN

1. Tersedianya fasilitasi dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme, agar rakyat memiliki tempat bertanya.
2. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum, agar rakyat memiliki tempat menyampaikan pendapat.
3. Terwujudnya pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika, agar rakyat tidak buta informasi.
4. Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern, agar rakyat tidak bertanya sendiri dan menjawab sendiri.

5. Meningkatkan kualitas jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah, agar rakyat berbudaya informasi.

V. SASARAN

1. Terwujudnya kerjasama dengan Badan Diklat Provsu dan Badan Litbang Depkominfo RI untuk ketersediaan Diklat Formal dan Diklat Teknis, bagi SDM/PNS bidang komunikasi dan informatika, agar mampu memberikan pelayanan informasi yang akurat, cepat, mudah dan merata kepada 12.764.245 jiwa penduduk yang berdiam di 33 Kab/Ko
2. Terwujudnya SOP dan SPM berdasarkan NSPK Bidang Komunikasi dan Informatika
3. Terwujudnya Regulasi untuk dasar hukum penggalan potensi PAD.
4. Terbukanya Jaringan dengan institusi Kominfo dan jaringan Bakohumas 33 Kab/Ko untuk mewujudkan Tempat Bertanya dan Tempat Menyampaikan Pendapat bagi masyarakat Sumatera Utara.
5. Terbukanya Jaringan KIM dan FK Metra 33 Kab/Ko
6. Terwujudnya kerjasama dengan asosiasi ICT, seperti Awari, Aspiluki, Astel, Mastel, Apkomindo dan Apjii Sumatera Utara untuk membuka blank spot jaringan TI di 5.747 desa.
7. Terwujudnya kerjasama dengan Asosiasi Kewartawanan dan Penerbit Surat Khabar : PWI, AJI dan Pimpinan Surat Khabar Lokal serta SPS untuk membuka blank spot penyebaran Surat Khabar Lokal di wilayah non komersil.
8. Terwujudnya kerjasama dengan E.O melalui ICCA dan PPPI untuk penanganan event skala provinsi dan skala nasional di Sumatera Utara.
9. Terwujudnya kerjasama dengan Ditjen Postel Depkominfo RI, Provider dan Operator Telekomunikasi untuk membuka blank spot jaringan telekomunikasi di 2.809 desa.
10. Terwujudnya kerjasama dengan ORARI dan RAPI untuk membuka blank spot hubungan telekomunikasi antar pulau, daerah terpencil dan kondisi luar biasa.
11. Terwujudnya kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk membuka blank spot Jaringan Pos dengan PO Box.
12. Terwujudnya kerjasama dengan KPID Provinsi Sumatera Utara untuk pengembangan master plan penyiaran Televisi dan penyiaran Radio di Sumatera Utara

13. Terwujudnya kerjasama dengan LPP TVRI Medan, LPS TV Swasta dan TV Kabel untuk membuka blank spot siaran televisi di Sumatera Utara.
14. Terwujudnya kerjasama dengan LPP RRI Medan, LPP RRI Sibolga, LPP RRI Gunung Sitoli, PRSSNI dan LPS Radio Lokal, untuk membuka blank spot siaran radio di Sumatera Utara.
15. Tersedianya Anggaran Belanja yang memadai mendukung ICT, Operasional APTEL, SKDI, Postel dan Kelembagaan Kominfo.

VI. STRATEGI

A. Faktor Kunci Keberhasilan – Analisa SWOT

Kekuatan Dinas Kominfo - S

1. **Semangat 205 personil PNS** Dinas Kominfo dengan kemampun berbagai bidang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. **Adanya sistem organisasi** yang mengatur sekretariat, aplikasi telematika, pos dan telekomunikasi, hubungan kelembagaan dan pendapat umum serta sarana komunikasi, desiminasi informasi serta **kekuatan instutusi ex-offico** Dinas Kominfo.
3. **Kemampuan** Dinas Kominfo untuk **beradaptasi** terhadap tuntutan kebutuhan perkembangan komunikasi dan informatika.
4. **Fasilitasi infrastruktur dasar** yang cukup memadai dalam mendukung kinerja organisasi.

Kelemahan Dinas Kominfo - W

1. **Rendahnya pengetahuan formal dan keterampilan teknis** personil PNS Dinas Kominfo
2. **Belum adanya Standar Operating Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)** Dinas Kominfo
3. **Dukungan APBD yang belum memadai**
4. **Fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai**

Peluang - O

1. **Adanya peluang PNS untuk mengikuti Pendidikan Formal** yang dibiayai melalui APBD Provinsi dan **peluang mengikuti Diklat Teknis** yang disediakan oleh Pemerintah Pusat.
2. **Adanya peluang mengeluarkan Regulasi** Pemerintah Provinsi atas berbagai Peraturan dan Perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika.
3. **Adanya peluang untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah** dari bidang komunikasi dan informatika.
4. **Adanya peluang kerjasama dukungan peralatan dan jaringan komunikasi dan informatika** dengan mitra kerja, pemerintah kabupaten/kota dan intitusi vertikal.

Ancaman - T

- a. **Tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan Informasi yang Akurat, Cepat, Mudah dan Merata**, seperti yang diamanatkan UU No. 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik, kepada 12.764.245 jiwa penduduk Sumatera Utara, dengan tingkat melek huruf 97,3% dan rata-rata lama sekolah 9,5, yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota dengan 385 Kecamatan dan 5.747 Desa/Kelurahan.
- b. **Tuntutan adaptasi atas kecepatan tinggi** perkembangan ICT, kelembagaan Komunikasi dan Informatika, Sarana Desiminasi Informasi serta perkembangan Pos dan Telekomunikasi termasuk penataan menara telekomunikasi **menghadapi Globalisasi Informasi yang diakibatkan letak geografis Sumatera Utara**, yang langsung berbatasan dengan Luar Negeri dan Lalu Lintas Laut/Udara Internasional, yang melahirkan kesimpangsiuran informasi di tengah-tengah masyarakat dan mempengaruhi kehidupan berpolitik, perekonomian, sosial budaya dan juga sisi pertahanan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara.
- c. **Pemahaman yang berbeda antara pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, eksekutif, legislatif dan masyarakat Sumatera Utara, atas implementasi PP No. 38/2007** tentang Kewenangan Pemerintah Daerah, khususnya pada bidang komunikasi dan informatika, yang memiliki potensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah.
- d. **Blank spot** jaringan telekomunikasi di 2.809 desa, Blank spot jaringan TI di seluruh wilayah Desa, Blank spot siaran LPP TVRI di 13 pemancar TV, Blank spot siaran LPP RRI di 9 pemancar RRI, Blank spot Surat Kabar Lokal yang saat ini berjumlah ± 43 SKH/M di wilayah non komersil, Blank spot 4 TV Swasta Lokal di wilayah Dataran Tinggi dan Pantai Barat.

ANALISA SWOT

		<i>Peluang – O</i>	<i>Ancaman – T</i>
		1 <i>Adanya peluang PNS untuk mengikuti Pendidikan Formal yang dibiayai melalui APBD Provinsi dan Diklat Teknis yang disediakan oleh Pem Pusat.</i>	1 <i>Tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan Informasi yang Akurat, Cepat, Mudah dan Merata</i>
		2 <i>Adanya peluang untuk menghasilkan PAD.</i>	2 <i>Pemahaman yang berbeda antara pemprov, pemkab/ko, legislatif dan masy Sumut, atas implementasi PP No. 38/2007</i>
		3 <i>Adanya peluang mengeluarkan Regulasi.</i>	<i>Tuntutan adaptasi menghadapi Globalisasi Informasi yang diakibatkan letak geografis Sumut</i>
		4 <i>Adanya peluang kerjasama dukungan peralatan dan jaringan.</i>	<i>Blank spot kominikasi dan informatika</i>
	<i>Kekuatan – S</i>	<i>Strategi S – O</i>	<i>Strategi S – W</i>
1	<i>Semangat 205 personil PNS</i>	1 <i>Maksimalkan kekuatan dan semangat PNS dengan meraih peluang adanya Diklat Formal dan Teknis</i>	1 <i>Maksimalkan kekuatan dan semangat PNS untuk mengatasi Tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan Informasi yang Akurat, Cepat, Mudah dan Merata</i>
2	<i>Adanya sistem organisasi dan institusi ex-officio</i>	2 <i>Maksimalkan kekuatan sistem organisasi dan institusi ex-officio untuk meraih peluang menghasilkan PAD</i>	2 <i>Maksimalkan kekuatan sistem organisasi dan institusi ex-officio untuk memberikan pemahaman yang sama antara pemprov, pemkab/ko, legislatif dan masy, atas implementasi PP 38/2007</i>
3	<i>Kemampuan Dinas Kominfo untuk beradaptasi</i>	3 <i>Maksimalkan kemampuan Dinas Kominfo beradaptasi dengan mengeluarkan Regulasi pendukung</i>	3 <i>Maksimalkan kemampuan Dinas Kominfo beradaptasi untuk menghadapi Globalisasi Informasi yang diakibatkan letak geografis Sumut</i>

4	<i>Fasilitasi infrastruktur dasar yang cukup memadai</i>	4	<i>Maksimalkan pemanfaatan infrastruktur dasar dengan meraih peluang kerjasama fasilitasi dari mitra kerja</i>	4	<i>Maksimalkan pemanfaatan infrastruktur dasar untuk mengatasi Blank spot kominikasi dan informatika</i>
Kelemahan – W					
	<i>Kelemahan – W</i>		<i>Strategi W - O</i>		<i>Strategi W – T</i>
1	<i>Rendahnya pengetahuan formal dan keterampilan teknis personil PNS</i>	1	<i>Atasi rendahnya pengetahuan formal dan keterampilan teknis personil PNS dengan meraih peluang adanya Diklat Formal dan Teknis</i>	1	<i>Atasi rendahnya pengetahuan formal dan keterampilan teknis personil PNS untuk mengatasi Tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan Informasi yang Akurat, Cepat, Mudah dan Merata</i>
2	<i>Belum adanya NSPK, SOP dan SPM</i>	2	<i>Atasi kelemahan belum adanya NSPK, SOP dan SPM untuk meraih peluang menghasilkan PAD</i>	2	<i>Atasi kelemahan belum adanya NSPK, SOP dan SPM untuk memberikan pemahaman yang sama antara pemprov, pemkab/ko, legislatif dan masy, atas implementasi PP 38/2007</i>
3	<i>Dukungan APBD yang belum memadai</i>	3	<i>Atasi kelemahan dukungan APBD yang belum memadai dengan mengeluarkan Regulasi pendukung</i>	3	<i>Atasi kelemahan dukungan APBD yang belum memadai untuk menghadapi Globalisasi Informasi yang diakibatkan letak geografis Sumut</i>
4	<i>Fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai</i>	4	<i>Atasi kelemahan fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai dengan meraih peluang kerjasama fasilitasi dari mitra kerja</i>	4	<i>Atasi kelemahan fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai untuk mengatasi Blank spot kominikasi dan informatika</i>

B. STRATEGI

Berdasarkan Analisa SWOT, maka Strategi Teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara :

Strategi S-O :

1. Maksimalkan kekuatan dan semangat PNS dengan meraih peluang adanya Diklat Formal dan Teknis.
2. Maksimalkan kekuatan sistem organisasi dan institusi ex-officio untuk meraih peluang menghasilkan PAD.
3. Maksimalkan kemampuan Dinas Kominfo beradaptasi dengan mengeluarkan Regulasi pendukung.
4. Maksimalkan pemanfaatan infrastruktur dasar dengan meraih peluang kerjasama fasilitasi dari mitra kerja.

Strategi S-T :

1. Maksimalkan kekuatan dan semangat PNS untuk mengatasi Tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan Informasi yang Akurat, Cepat, Mudah dan Merata
2. Maksimalkan kekuatan sistem organisasi dan institusi ex-officio untuk memberikan pemahaman yang sama antara pemprov, pemkab/ko, legislatif dan masy, atas implementasi PP 38/2007
3. Maksimalkan kemampuan Dinas Kominfo beradaptasi untuk menghadapi Globalisasi Informasi yang diakibatkan letak geografis Sumut
4. Maksimalkan pemanfaatan infrastruktur dasar untuk mengatasi Blank spot kominikasi dan informatika

Strategi W-O :

1. Atasi rendahnya pengetahuan formal dan keterampilan teknis personil PNS dengan meraih peluang adanya Diklat Formal dan Teknis
2. Atasi kelemahan belum adanya NSPK, SOP dan SPM untuk meraih peluang menghasilkan PAD
3. Atasi kelemahan dukungan APBD yang belum memadai dengan mengeluarkan Regulasi pendukung
4. Atasi kelemahan fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai dengan meraih peluang kerjasama fasilitasi dari mitra kerja

Strategi W-T :

1. Atasi rendahnya pengetahuan formal dan ketrampilan teknis personil PNS untuk mengatasi Tuntutan masyarakat atas pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan Informasi yang Akurat, Cepat, Mudah dan Merata
2. Atasi kelemahan belum adanya NSPK, SOP dan SPM untuk memberikan pemahaman yang sama antara pemprov, pemkab/ko, legislatif dan masy, atas implementasi PP 38/2007.

3. Atasi kelemahan dukungan APBD yang belum memadai untuk menghadapi Globalisasi Informasi yang diakibatkan letak geografis Sumut
4. Atasi kelemahan fasilitasi peralatan operasional yang belum memadai untuk mengatasi Blank spot komunikasi dan informatika

VII. KEBIJAKAN

Berdasarkan Strategi, maka Kebijakan Teknis operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Peningkatan kualitas SDM dan penguatan tata kelola pelayanan dengan penetapan NSPK, standar operating prosedur dan standar pelayanan minimal untuk berbagai kewenangan
2. Peningkatan sinergitas dan integrasi kelembagaan komunikasi dan informatika
3. Pengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, termasuk kelembagaan.
4. Perluasan sarana komunikasi dan desiminasi informasi
5. Pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana komunikasi dan telematika dan prasarana non telekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika.
6. Perluasan sarana pos dan jaringan telekomunikasi
7. Penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan komunikasi dan Informatika dalam lingkungan multi operator.
8. Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju next generation network;
9. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.

BAB – 5

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

I. PROGRAM

Untuk percepatan pencapaian Tujuan dan Sararan, maka Program yang akan dilaksanakan adalah :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)*
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur(Program Rutin)*
- 3. Program Peningkatan Displin Aparatur(Program Rutin)*
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Program Rutin)*
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja Keuangan (Program Rutin)*
- 6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Block Grand Depkominfo RI – BIP)*
- 7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Program Operasional)*
- 8. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (Program Operasional)*
- 9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Program Operasional)*
- 10. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi(Program Operasional)*

II. KEGIATAN POKOK.

Berdasarkan Program Pembangunan untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada PP No. 38 Tahun 2007 yang disesuaikan dengan RPJMD 2009-2013 dan , maka kegiatan pokok dari masing-masing program pada Badan Informasi dan Komunikasi dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (Program Operasional), dengan kegiatan pokok :*
 - a. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran*

- b. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi
 - c. Peningkatan dan pemantapan akses informasi
 - d. Pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi
 - e. Diseminasi informasi nasional dan provinsi
 - f. Penyebaran informasi melalui penerbitan, publikasi dan pameran skala provinsi
2. ***Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (Program Operasional), dengan kegiatan pokok :***
- a. Pengembangan kelembagaan dan kemitraan institusi komunikasi dan informatika skala provinsi
 - b. Pengembangan dokumentasi dan perpustakaan komunikasi dan informatika skala provinsi
 - c. Pemberdayaan pendapat umum untuk komunikasi dan informatika skala provinsi
3. ***Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik(Program Operasional), dengan kegiatan pokok :***
- a. Pengembangan Pusat Informasi Publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil
 - b. Peningkatan pelayanan e-government, standarisasi dan aplikasi telematika
 - c. Pengembangan Telematika untuk mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance bagi semua Unit Kerja yang terkait dengan pelayanan publik dalam setiap proses pemberian pelayanan yang mudah, efisien dan berkualitas
4. ***Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi(Program Operasional), dengan kegiatan pokok :***
- a. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang
 - b. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang
 - c. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah
 - d. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio
 - e. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi.
 - f. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end)* cakupan provinsi.
 - g. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
 - h. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi

”1

- i. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
- j. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi
- k. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi.
- l. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi
- m. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN	INDIKASI PAGU ANGGARAN				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa</i>	<i>Terwujudnya kepastian legal yang menjamin hak-hak masyarakat men dapatkan informasi yang diperlukan (right to know) dan kewajiban pemerin tah untuk menyampaikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat (obligation to tell)</i>		<i>2.256.528.675</i>	<i>3.054.824.175</i>	<i>5.984.607.650</i>	<i>11.403.537.925</i>	<i>10.501.012.187</i>
1.	<i>Pementasan Media Tradisional ditelevisi</i>	<i>Terinformasinya program Pemerin-tah melalui pementasan media tra-disional di TVRI</i>		<i>64.000.000</i>	<i>22.605.000</i>	<i>25.995.750</i>	<i>29.895.200</i>	<i>34.379.500</i>
2.	<i>Pagelaran Pertunjukan Rakyat di Kab/Ko</i>	<i>Terinformasinya program Pemerin- tah melalui pementasan media tradisi onal di kab/ko</i>		<i>79.980.000</i>	<i>166.580.000</i>	<i>178.067.000</i>	<i>191.278.000</i>	<i>206.489.000</i>
3.	<i>Pagelaran Pertunjukan Rakyat tingkat Nasional</i>	<i>Terlaksananya Pa- gelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional</i>		<i>60.000.000</i>	<i>-</i>	<i>69.000.000</i>	<i>79.350.000</i>	<i>91.252.500</i>
4.	<i>Lomba Kelompok Informasi Masyarakat</i>	<i>Terlaksananya Lomba Kelompok Informasi Masyarakat</i>		<i>-</i>	<i>75.125.000</i>	<i>86.394.000</i>	<i>99.353.000</i>	<i>114.256.000</i>
5.	<i>Siaran Keliling</i>	<i>Lancarnya infor- masi pembangun an ke masyarakat</i>		<i>95.000.000</i>	<i>78.750.000</i>	<i>83.062.500</i>	<i>73.022.000</i>	<i>73.022.000</i>
6.	<i>Pekan Raya Sumatera Utara</i>	<i>Meningkatnya pemantapan akses informasi</i>		<i>65.000.000</i>	<i>81.330.000</i>	<i>93.529.500</i>	<i>107.559.000</i>	<i>123.693.000</i>
7.	<i>Infokom Expo mendukung berbagai kegiatan Pemprov</i>	<i>Terexponya segala kegiatan pemprov</i>		<i>65.000.000</i>	<i>-</i>	<i>74.750.000</i>	<i>85.962.500</i>	<i>98.857.000</i>

8.	Sosialisasi tahunan pemerintahan Gubsu dan Wagubsu	Tersosialisasinya pemerintahan Gubsu dan Wagubsu setiap tahun		246.000.000	200.000.000	240.000.000	288.000.000	345.600.000
9.	Penerbitan Kalender Pemprov	Terpublikasinya segala kegiatan Pemprov		46.900.000	51.442.500	120.625.000	120.625.000	120.625.000
10.	Penyusunan Materi dan Penerbitan Tabloid Transisi	Terlaksananya Penyusunan materi dan Penerbitan Tabloid Transisi		74.850.000	103.860.000	119.439.000	137.354.850	157.959.000
11.	Iklan Layanan Masyarakat dan Adventorial	Terlaksananya iklan Layanan Masyarakat dan Adventorial		-	85.000.000	150.000.000	200.000.000	230.000.000
12.	Dialog Interaktif di Radio	Terjalin dan terserapnya arus informasi antara Pemprov dgn masyarakat		43.683.000	49.425.000	98.610.000	98.610.000	113.401.500
13.	Dialog Interaktif di TV	Terjalin dan terserapnya arus informasi antara Pemprov dgn masyarakat		44.623.000	49.425.000	103.800.000	103.800.000	119.370.000
14.	Pembinaan Media Massa	Meningkatkan citra informasi pemerintah		150.000.000	150.000.000	172.500.000	172.500.000	198.375.000
15.	Pemprov menjawab di RRI	Adanya siaran acara pemprov menjawab di RRI Madya Medan		95.625.000	95.625.000	109.968.800	126.465.000	145.433.700
16.	Aspirasi Publik di RRI	Terserapnya siaran acara aspirasi publik di RRI Madya Medan		63.271.875	63.271.875	72.762.700	83.678.000	96.229.000
17.	Ayo Tanya Dokter di RRI	Meningkatnya pengetahuan kesehatan masyarakat di Sumatera Utara		87.949.800	87.949.800	101.142.500	116.313.800	133.761.000
18.	Anak Cerdas Kita di RRI	Terpacunya para Pelajar Sumatera Utara untuk lebih berprestasi		58.633.200	58.633.200	67.428.200	77.542.500	89.174.000
19.	Pemprov menjawab di TVRI	Terlaksananya siaran pemprov menjawab di TVRI		50.936.220	50.936.220	58.576.700	67.363.500	77.468.000
20.	Sumut dalam Berita di TVRI	Tersalurkannya informasi berita daerah		280.055.500	280.055.500	322.064.000	370.373.500	425.929.500
21.	Mimbar Agama Islam di TVRI	Pemirsanya di Sumatera Utara mendapat siraman rohani melalui mimbar agama Islam		187.500.000	187.500.000	215.625.000	247.968.800	285.164.200

22.	Mimbar Agama Kristen di TVRI	Pemirsa di Sumatera Utara menda pat siraman rohani melalui mimbar agama Kristen		187.500.000	187.500.000	215.625.000	247.968.800	285.164.200
23.	Mimbar Agama Budha/Hindu di TVRI	Pemirsa di Sumatera Utara menda pat siraman rohani melalui mimbar agama Budha/Hindu		187.500.000	187.500.000	215.625.000	247.968.800	285.164.200
24.	Siaran Tunda di TVRI	Terlaksananya tayangan siaran tunda di TVRI		13.002.000	13.002.000	14.952.500	17.195.200	19.774.500
25.	Siaran Langsung (OB Van di TVRI)	Terlaksananya tayangan siaran langsung di TVRI		19.769.080	19.769.080	22.734.500	26.144.700	30.066.500
26.	Gerak Pembangunan Sumut yg meliputi Kab/Ko	Terlaksananya Dokumentasi dan penyiaran visual Gerak Pembangunan Sumut		-	115.230.000	132.514.500	152.391.700	175.250.500
27.	Pertemuan koordinasi Gubsu dengan pimpinan surat kabar, muspida dan pejabat Pemprov	Terkoordinirnya kegiatan dan kebijakan Gubsu dengan Pimpinan surat kabar dan pejabat pemprov		59.750.000	34.534.000	39.714.100	45.671.500	52.522.000
28.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kominfo	Terlaksananya Dokumentasi dan penyiaran visual Gerak Pembangunan Sumut		-	-	86.250.000	99.187.500	114.065.700
29.	Kepesertaan Bintek SKDI	Adanya peserta Bintek untuk bidang SKDI		-	-	22.287.000	22.287.000	22.287.000
30.	Sosialisasi/Publikasi melalui Media Luar Ruang (Media Out Door) pada Kegiatan Hari-Hari Besar	Terlaksananya sosialisasi melalui media luar ruang		-	50.000.000	57.500.500	66.125.000	76.043.750
31.	Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov	Terlaksananya Lomba karya tulis/ lomba foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov		-	120.000.000	144.000.000	172.800.000	207.360.000
32.	Ekspose Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara	Terlaksananya eks pose Hari Jadi Provsu		-	90.000.000	108.000.000	129.600.000	155.520.000
33.	Dialog Pembangunan Sumatera Utara di Televisi	Terlaksananya dialog Pembangunan Sumatera Utara di Televisi		-	170.000.000	204.000.000	244.800.000	293.760.000

34.	Dialog tentang Pembangunan Sumatera Utara bersama kelompok strategis	Terlaksananya dialog tentang Pembangunan Sumatera Utara bersama kelompok strategis		-	90.000.000	108.000.000	129.600.000	155.520.000
35.	Dialog Gubsu dengan Mahasiswa	Terlaksananya dialog Gubsu dgn mahasiswa		-	50.000.000	60.000.000	72.000.000	86.400.000
36.	Sosialisasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik(KIP) dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE)	Tersosialisasinya UU No.14/2008 tentang keterbukaan informasi publik dan informasi transaksi elektronik		-	60.000.000	72.000.000	86.400.000	103.680.000
37.	Pementasan Pertunjukan Rakyat di kab/ko	Terlaksananya Pementasan Pertunjukan Rakyat di kab/ko		-	-	60.000.000	69.000.000	79.350.000
38.	Lomba Pementasan Media Tradisional di Kab/ko	Terpilihnya Pemenang Lomba Pementasan Tradisional di Kab/Ko		-	-	95.000.000	109.250.000	125.637.500
39.	Ragam serumpun	Terlaksananya Tayangan Ragam Serumpun		-	-	100.000.000	115.000.000	132.250.000
40.	Satu jam bersama DPRD Sumut di TVRI	Terlaksananya Tayangan Bincang-bincang Satu Jam bersama DPRD Sumut di TVRI		-	-	105.180.000	120.957.000	139.100.550
41.	.Pertemuan Pekan Informasi Nasional	Terlaksananya Pertemuan Pekan Informasi Nasional		-	-	30.519.500	35.097.425	40.362.100
42.	Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah Barat dan Nasional	Terbinanya Kelompok Informasinya Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah Barat dan Nasional		-	-	38.839.400	44.665.400	51.365.200
43.	Sosialisasi Pemetaan FK Metra / KIM di Kab/Ko	Tersosialisasinya Pemetaan FK Metra / KIM di Kab/Ko		-	-	-	43.386.000	49.893.000
44.	Sosialisasi Komunikasi dan Informasi Pra Pilkada Gubsu/Wagubsu melalui Televisi dan Radio	Terlaksananya Sosialisasi Komunikasi dan Informasi Pra Pilkada Gubsu/Wagubsu melalui TV dan Radio		-	-	-	247.407.500	284.518.625

45.	<i>Penerbitan Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumatera Utara</i>	<i>Tersedianya Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumatera Utara</i>		-	-	-	138.765.000	159.579.750
46.	<i>Sosialisasi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Pra Pilkada Gubsu / Wagubsu di Kab / Ko</i>	<i>Terlaksananya Sosialisasi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Pra Pilkada Gubsu /Wagubsu di Kab / Ko</i>		-	-	-	184.195.500	211.824.825
47.	<i>Sosialisasi Pilgubsu melalui Media Cetak</i>	<i>Terlaksananya Sosialisasi Pilgubsu melalui Media Cetak</i>		-	-	-	106.241.000	122.177.150
48.	<i>Sosialisasi Pilgubsu melalui Media Outdoor</i>	<i>Terlaksananya Sosialisasi Pilgubsu melalui Media Outdoor</i>		-	-	-	126.821.000	145.844.150
49.	<i>Pertemuan Komunikasi dan Informasi antara Muspida Plus se-Sumatera Utara dalam Rangka Pra Pilkada Gubsu / Wagubsu</i>	<i>Terlaksananya Pertemuan Komunikasi dan Informasi antara Muspida Plus se-Sumatera Utara dalam Rangka Pra Pilkada Gubsu / Wagubsu</i>		-	-	-	113.498.500	153.523.275
50.	<i>Talkshow Gubsu Mendengar Rakyat di Radio</i>	<i>Terlaksananya Talkshow Gubsu Mendengar Rakyat di Radio</i>		-	-	-	206.345.000	237.296.750
51.	<i>Talkshow Sumut Membangun di Radio</i>	<i>Terlaksananya Talkshow Sumut Membangun di Radio</i>		-	-	-	206.345.000	237.296.750
52.	<i>Talkshow dalam rangka HUT RI Provsu di Radio</i>	<i>Terlaksananya Talkshow dalam rangka HUT RI Provsu di Radio</i>		-	-	-	206.345.000	237.296.750
53.	<i>Talkshow Kaleidoskop Akhir di Radio</i>	<i>Terlaksananya Talkshow Kaleidoskop Akhir di Radio</i>		-	-	-	206.345.000	237.296.750
54.	<i>Talkshow Program Prioritas APBD TA. 2012 Provsu</i>	<i>Terlaksananya Talkshow Kaleidoskop Akhir di Radio</i>		-	-	-	206.345.000	237.296.750
55.	<i>Talkshow Menyambut Ramadhan dan Hari Raya di Radio</i>	<i>Terlaksananya Talkshow Menyambut Ramadhan dan Hari Raya di Radio</i>		-	-	-	206.345.000	237.296.750

56	<i>Iklan Layanan Masyarakat</i>	<i>Tereksposnya kebijakan pemprovsu di masyarakat</i>		-	-	-	1.004.860.000	1.155.589.000
57	<i>Pementasan Pertunjukan Rakyat Media tradisional di Kab/ko</i>	<i>Terinformasinya Program Pemerintah melalui Pementasan Media Tradisional di Kab/ko</i>		-	-	52.800.000	60.720.000	69.828.000
58	<i>Lomba Pementasan Media Tradisional di kab/Ko</i>	<i>Terpilihnya juara pementasan Media Tradional di Kab/ko</i>		-	-	85.725.000	98.583.750	113.371.312
59	<i>Tabloid Sumut Membangun</i>	<i>Tersedianya Tabloid Sumut Membangun</i>		-	-	-	650.000.000	700.000.000
60	<i>Seminar Nasional Komunikasi Humanis menghindari konflik menuju sumut kondusif</i>	<i>Terlaksananya seminar Nasional Komunikasi Humanis menghindari konflik menuju sumut kondusif</i>		-	-	-	227.500.000	-
61	<i>Penerbitan Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumut</i>	<i>Tersedianya Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumut</i>		-	-	-	138.765.000	-
62	<i>Pembuatan Steger</i>	<i>Terlasannya pembuatan steager</i>		-	-	-	93.600.000	-
-II.	<i>Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga</i>	<i>Terwujudnya pelayanan informasi kemitraan</i>		588.496.485	1.072.383.000	1.657.616.850	2.550.999.675	2.700.944.140
1.	<i>Kajian Issue Krusial</i>	<i>Terlaksananya kajian issue krusial</i>		-	73.560.000	84.594.000	97.283.100	111.876.000
2.	<i>Jumpa Publik</i>	<i>Terwujudnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas</i>		75.000.000	-	86.250.000	99.187.500	114.066.000
3.	<i>Penanganan Unjuk Rasa</i>	<i>Tersalurnya aspirasi masyarakat kpd Pemprovsu</i>		28.119.000	19.578.000	22.514.700	25.892.000	29.776.000
4.	<i>Diskusi Panel/Sarasehan</i>	<i>Terlaksananya panel diskusi/sarasehan pada hari besar bersejarah dan kenegaraan</i>		48.738.000	43.965.000	50.559.750	58.143.800	66.866.000
5.	<i>Jumpa Pers Instansi</i>	<i>Terinformasinya kebijakan Pemprovsu antar instansi kepada masyarakat</i>		62.805.000	107.760.000	123.924.000	142.512.600	163.889.500

6..	<i>Coffee Morning</i>	<i>Terinformasinya kebijakan Pem provsu kepada masyarakat</i>		<i>105.046.875</i>	<i>99.120.000</i>	<i>113.988.000</i>	<i>131.086.200</i>	<i>150.749.200</i>
7.	<i>Dokumentasi, Pelapo-ran dan Perpustakaan Kegiatan Dinas Kominfo</i>	<i>Terdokumentasinya kegiatan Dinas Kominfo</i>		<i>29.197.260</i>	<i>43.960.000</i>	<i>50.554.000</i>	<i>58.137.100</i>	<i>66.857.665</i>
8.	<i>Pertemuan Infokom/Humas Pemprov</i>	<i>Terjalannya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi dan terarah antar Kominfo/Humas Pemprov dan Kab/Kota se Sumatera Utara</i>		<i>49.000.000</i>	<i>42.630.000</i>	<i>49.024.500</i>	<i>56.378.200</i>	<i>64.835.000</i>
9.	<i>Roadshow dan forum dialog dalam rangka desiminasi informasi ke Kab/Kota</i>	<i>Terlaksananya Roadshow dan forum dialog dlm rangka desiminasi informasi ke Kab/Kota</i>		<i>-</i>	<i>193.740.000</i>	<i>222.801.000</i>	<i>256.222.000</i>	<i>294.654.500</i>
10.	<i>Temu Konsultasi Bakohumas</i>	<i>Terpenuhinya standard pelayan an bagi aparat kehumasan dan Pengukuhan Sek-retariat Bakohu mas</i>		<i>75.590.350</i>	<i>48.560.000</i>	<i>55.844.000</i>	<i>64.220.600</i>	<i>73.853.700</i>
11.	<i>Temu konsultasi KIM dan FK. Metra</i>	<i>Terjalannya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi dan terarah KIM dan FK. Metra</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>87.000.000</i>	<i>100.050.000</i>	<i>115.057.500</i>
12.	<i>Temu konsultasi Kemitraan Asosiasi Jaringan Internet</i>	<i>Terjalannya hubungan/koordinasi yang selaras, serasi dan terarah dengan mitra jaringan internet</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>87.000.000</i>	<i>100.050.000</i>	<i>115.057.500</i>
13.	<i>Temu Konsultasi anggota Advertising dan Event Organizer</i>	<i>Terjalannya hubu ngan/koordinasi yg selaras, serasi dan terarah ang gota advertising dan event organizer</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>87.000.000</i>	<i>100.050.000</i>	<i>115.057.500</i>

14.	<i>Kepesertaan BinteK Kelembagaan</i>	<i>Adanya peserta BinteK kelembagaan</i>		-	-	22.287.000	22.287.000	22.287.000
15.	<i>Operasional sekretariat tim monitoring hemat energi</i>	<i>Termonitoringnya program hemat energi</i>		35.000.000	16.000.000	18.400.000	21.160.000	24.334.000
16.	<i>Peningkatan Capacity Building untuk penguatan juru bicara Pemerintah (CIO) berbasis Teknologi Informasi</i>	<i>Adanya Peningkatan Capacity Building untuk penguatan juru bicara Pemerintah (CIO) berbasis Tekno-logi Informasi</i>		-	25.000.000	30.000.000	36.000.000	43.200.000
17.	<i>Peningkatan Capacity Building untuk penguatanbagi Juru Foto dan Juru Kamera dilingkungan Humas dalam rangka Penerapan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP)</i>	<i>Adanya Peningkatan Capacity Building untuk penguatanbagi Juru Foto dan Juru Kamera dilingkungan Humas dalam rangka Penerapan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (KIP)</i>		-	25.000.000	30.000.000	36.000.000	43.200.000
18.	<i>Workshop Pendidikan Pemerintah bagi Wartawan</i>	<i>Terlaksananya workshop Pendidikan Pemerintah bagi Wartawan</i>		-	50.000.000	60.000.000	72.000.000	86.400.000
19.	<i>Bantuan untuk operasional iklan jurnalis Televisi Indonesia</i>	<i>Adanya bantuan untuk operasional iklan jurnalis Televisi Indonesia</i>		-	70.000.000	84.000.000	100.800.000	120.960.000
20.	<i>Forum Dialog tentang Pembangunan Sumut dengan wartawan asal Sumut di Jakarta</i>	<i>Terlaksananya forum Dialog tentang Pembangunan Sumut dengan wartawan asal Sumut di Jakarta</i>		-	100.000.000	120.000.000	144.000.000	172.800.000
21.	<i>Dokumentasi kegiatan Gubsu dan Wagubsu</i>	<i>Terlaksananya dokumentasi kegiatan Gubsu dan Wagubsu</i>		-	50.000.000	60.000.000	72.000.000	86.400.000
22.	<i>Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi Melalui Media Informasi</i>	<i>Terlaksananya eksaminasi informasi dan penyiaran informasi mingguan instaznsi melalui media informasi</i>		80.000.000	63.510.000	73.036.500	83.991.975	83.991.975

23.	<i>Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional</i>	<i>Terjalannya hubungan bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional</i>		-	-	38.839.400	44.665.400	51.365.200
24.	<i>Operasional Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu</i>	<i>Terlaksananya Operasional Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu</i>		-	-	-	28.882.200	105.000.000
25.	<i>Pekan Bakohumas</i>	<i>Adanya Pekan Bakohuman</i>		-	-	-	500.000.000	-
26	<i>Workshop Kehumasan</i>	<i>Bertambahnya SDM dibidang kehumasan</i>		-	-	-	100.000.000	115.000.000
27	<i>Pertemuan Humas Kab/Ko dengan Jurnalis Daerah</i>	<i>Adanya Pertemuan Humas Kab/Ko dengan Jurnalis Daerah</i>		-	-	-	-	60.520.000
28	<i>Pencerdasan Politik bagi Jurnalis guna mendukung Media Massa mensukseskan Tahun Politik Sumut 2013</i>	<i>Adanya Pencerdasan Politik bagi Jurnalis guna mendukung Media Massa mensukseskan Tahun Politik Sumut 2013</i>		-	-	-	-	35.787.000
29	<i>Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka mendukung Good Governments</i>	<i>Meningkatnya wawasan kepemimpinan jurnalis dalam rangka good Governmet</i>		-	-	-	-	114.765.900
30	<i>Pembekalan Peran Media Massa dalam memberhasilkan program – program Strategis Sumatera mendukung Pembangunan Nasional</i>	<i>Meningkatnya peran Massa dalam memberhasilkan program – program Strategis Sumatera mendukung Pembangunan Nasional</i>		-	-	-	-	52.337.000
III.	<i>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik</i>	<i>Terwujudnya pelayanan informasi multimedia yang berkualitas</i>		1.335.755.750	1.583.546.500	4.239.154.150	7.738.448.975	6.834.785.955
1.	<i>Pusat Informasi Publik</i>	<i>Tersentraliasinya informasi publik</i>		304.082.750	256.020.000	294.423.000	338.586.500	389.374.500

2.	Web to SMS Layanan Informasi Pembangunan	Terlaksananya web to SMS untuk layanan informasi pembangunan		85.000.000	-	97.750.000	112.412.500	129.274.400
3.	Biaya berlangganan LKBN Antara	Tersedianya informasi dari LKBN Antara		54.000.000	40.000.000	46.000.000	52.900.000	60.835.000
4.	Pengembangan dan Pemutahiran Sumut-on line	Terup-datenya website Sumut online		25.000.000	20.000.000	23.000.000	26.450.000	30.417.500
5.	Peningkatan Kualitas Layanan Informasi melalui Website	Penyajian data secara komputerisasi dan data base yang baik		144.873.000	259.611.500	298.553.500	343.336.400	394.836.700
6.	Pembuatan Audio Visual LKPJ Gubsu	Audio visual LKPJ Gubsu		75.000.000	61.715.000	70.972.250	81.618.200	93.860.800
7.	Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Lancarnya sistem komunikasi dan informasi		100.000.000	196.000.000	225.400.000	259.210.000	298.091.500
8.	Monitoring dan Evaluasi Server pada Bidang aplikasi dan Telematika Diskominfo	Lancarnya sistem komunikasi dan informasi		57.800.000	291.200.000	334.880.000	385.112.000	442.878.800
9.	Pemakaian Internet Access dan Lokal Link dari Indosat ke Diskominfo	Ter-onlinenya jaringan selama 24 jam di kantor Gubsu		360.000.000	360.000.000	414.000.000	476.100.000	547.515.000
10.	Pengadaan dan Instalasi radiolink untuk transmisi data dan voice di jajaran pemprov	Terlaksananya pengadaan dan instalasi radiolink untuk transmisi data dan voice di jajaran pemprov		-	-	98.000.000	-	-
11.	Kepesertaan Bintek Aplikasi dan Telematika	Adanya peserta Bimtek bidang Aplikasi dan Telematika		-	-	22.287.000	22.287.000	22.287.000
12.	Koordinasi pembangunan Jaringan ICT	Terlaksananya pembangunan jaringan ICT		-	-	50.000.000	57.500.000	66.125.000
13.	Pembukaan Internet Access di 33 Kab/Ko	Terlaksananya pembukaan internet akses di 33 kab/ko		-	-	-	330.000.000	379.500.000
14.	Biaya berlangganan Jaringan Internet dan Hot Spot	Adanya biaya berlangganan jaringan internet dan hotspot		130.000.000	99.000.000	113.850.000	131.927.500	150.566.700
16.	Pembangunan Jaringan Internet (Layanan VPN-IP)	Adanya pembangunan jaringan internet (layanan VPN-IP)		-	-	1.187.145.850	-	-

17.	Bimbingan Teknis Penggunaan Web Internal	Adanya bimbingan teknis penggunaan web internal	-	-	40.733.250	44.806.575	44.806.575
18.	Sosialisasi Pembangunan Pemprov dan DPRDSU melalui Perum Antara	Tercapainya sosialisasi Pembangunan Pemprov dan DPRDSU melalui Perum Antara	-	-	120.000.000	138.000.000	158.700.000
19.	Pembuatan Video Profile Sumut	Adanya video profil Sumut	-	-	80.000.000	92.000.000	105.800.000
20.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Video Confrence	Terlaksanya pembangunan sarana dan prasarana Video Confrence	-	-	650.000.000	747.500.000	859.625.000
21.	Biaya Abodemen Jaringan Intranet	Tersedianya jaringan intranet (VPN –IP)	-	-	-	294.000.000	338.100.000
22.	Forum Komunikasi E-Government Provinsi dan Kab	Meningkatnya pelaksanaan e-government	-	-	-	50.000.000	57.500.000
23.	Bimtek Penggunaan Open source software (OSS)	Berkurangabnya penggunaan software yang ilegal	-	-	-	50.000.000	57.500.000
24.	Monitoring dan Evaluasi Server, Peralatan Multimedia dan Jaringan	Lancarnya penyampaian sistem informasi dan komunikasi	-	-	-	300.000.000	345.000.000
25.	Operasional Publikasi Informasi PIP melalui Media Center	Terinformasinya kebijakan pemprov kepada masyarakat	-	-	-	30.000.000	34.500.000
26.	Pengembangan dan Pemuktahiran Website Dinas Kominfo	Terupdatenya web site Sumut On- line	-	-	-	35.000.000	40.250.000
27.	Pembuatan Video 7 Program Prioritas Provsu	Tersedia video propil Sumut	-	-	-	80.000.000	92.000.000
28.	Biaya Operasional Komisi Informasi Sumatera Utara	Terlaksanya Operasionl Komisi Inormasi Sumatera Utara	-	-	-	1.200.000.000	1.380.000.000
29.	Pengadaan Server Induk	Tersedianya Server induk	-	-	-	205.275.000	236.066.250
30.	Pembuatan Pergub Tentang E-Government	Adanya pergub tentang e- government	-	-	-	200.000.000	-
31.	Seminar Aplikasi dan Telematika	Terlaksanya Seminar Aplikasi Telematika	-	-	-	95.800.000	-

32.	Pembangunan ruang Server dan Perangkat pendukung	Tersedianya ruang server dan perangkat pendukung		-	-	-	552.018.000	-
33.	Masterplan e- government Pemerintah Sumut	Terlaksananya Masterplan e- government Pemerintah Sumut		-	-	-	534.450.000	-
34.	Seminar Aplikasi dan Telematika	Terlaksananya Seminar Aplikasi dan telematika		-	-	-	89.500.000-	-
35	Peningkatan pelayan website Diskominfo Provsu	Meningkatnya website Diskominfo Provsu					200.000.000	-
36	Upgrade Bandwith intranet 45 SKPD	Adanya Upgrade Bandwith intranet 45 SKPD					200.000.000	-
IV	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	Terwujudnya pelayanan jasa pos dan telekomunikasi		736.926.900	433.412.000	1359432025	3.190.034.750	3.987.134.008
1.	Operasional pemberi izin bidang pos dan telekomunikasi	Terlaksananya Operasional Pemberi izin di bidang pos dan telekomunikasi		-	43.780.725	50.347.900	57.900.000	66.585.000
2.	Penertiban dibidang postel	Terlaksananya penertiban dibidang Postel		-	80.000,000	92.000.000	105.800.000	121.670.000
3.	Bimbingan tehnis di bidang sarana teleko-munikasi pelayanan, kinerja operasi dan pelayanan universal di skala wilayah	Terlaksananya bimbingan tehnis di bidang sarana telekomunikasi pelayanan, kinerja operasi dan pelayanan univ er sal di skala wilayah		-	-	73.082.500	84.044.900	96.652.000
4.	Rapat evaluasi rutin pos dan telekomunikasi	Terlaksananya rapat evaluasi rutin pos dan telekomunikasi		-	33.196.275	38.175.000	43.902.000	50.487.500
5.	Penyusunan buku peraturan dan perundang-undangan pos dan telekomunikasi	Terlaksananya penyusunan buku peraturan dan per undang-ndangan pos dan telekomu nikasi		-	22.230,000	22.230.000	-	-

6.	<i>Koordinasi pembangunan kewajiban layanan universal telekomunikasi (USO) di kab/ko</i>	<i>Terlaksananya koordinasi penggunaan kewajiban layanan universal telekomunikasi (USO) di kab/ko</i>		-	64.560.000	74.244.000	85.380.600	98.187.700
7.	<i>Penerbitan tabloid pos dan telekomunikasi</i>	<i>Terlaksananya penerbitan tabloid pos dan telekomunikasi</i>		-	43.620,000	50.163.000	57.687.500	66.340.600
8.	<i>Pembelian peralatan GPS</i>	<i>Terlaksananya pembelian peralatan GPS</i>		-	27,000,000	27.000.000	27.000.000	-
9.	<i>Pembelian mobil operasional postel</i>	<i>Terlaksananya pembelian mobil operasional postel</i>		-	-	160,000,000	-	-
10.	<i>Rapat koordinasi dengan mitra kerja media massa postel, asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya</i>	<i>Terlaksananya rapat koordinasi dengan mitra kerja media massa pos tel, asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya</i>		-	40,980,000	47.127.000	54.196.050	62.325.458
11.	<i>Konsultasi teknis NSPK postel dan rapat koordinasi postel</i>	<i>Terlaksananya konsultasi teknis NSPK postel dan rapat koordinasi postel</i>		-	78,045,000	89.752.000	103.214.600	118.697.000
12.	<i>Kepesertaan Bintek Postel</i>	<i>Adanya peserta Bintek bidang Pos dan Telematika</i>		-	-	22.287.000	22.287.000	22.287.000
13.	<i>Koordinasi Penataan Menara Komunikasi Kab/Ko</i>	<i>Terkoordinasinya pembangunan menara antara operator</i>	36.926.900	-	-	42.466.000	48.836.000	56.161.200
14.	<i>Temu konsultasi organisasi Amatir dan Radio Antar Penduduk</i>	<i>Terjalinnnya hubungan dan koordinasi yang selaras dan terarah dgn organisasi amatir dan radio antar penduduk</i>		-	-	99.160.000	114.034.000	131.140.000
15.	<i>Temu konsultasi Pertelevision dan Radio</i>	<i>Terjalinnnya hubungan dan koordinasi yang selaras dan terarah pertelevisian dan radio</i>		-	-	99.160.000	114.034.000	131.140.000
16.	<i>Temu konsultasi Pos dan Jasa titipan</i>	<i>Terjalinnnya hubungan dan koordinasi yang selaras dan terarah pos dan jasa titipan</i>		-	-	99.160.000	114.034.000	131.140.000

17.	Temu konsultasi Provider dan Operator	Terjalannya hubungan & koordinasi yang selaras dan terarah provider dan operator		-	-	99.160.000	114.034.000	131.140.000
18.	Koordinasi Operasional Radio Amatir dan antar Penduduk	Terlaksananya koordinasi yg se-laras dan terarah radio amatir dan antar penduduk		-	-	50.000.000	57.500.000	66.125.000
19.	Koordinasi mengatasi Blankspot Siaran TV dan Radio	terlaksananya koordinasi untuk mengatasi blank spot siaran TV dan radio		-	-	50.000.000	57.500.000	66.125.000
20.	Koordinasi Pembangunan PO Box dan Jasa Titipan di setiap Desa	Terlaksananya pembangunan PO Box dan Jasa titipan di setiap Desa		-	-	50.000.000	57.500.000	66.125.000
21.	Pembuatan Ranperda Menara Telekomunikasi Bersama	Adanya Ranperda & Perda Menara Telekomunikasi Bersama	315.175.000		-	-	-	-
22.	Sosialisasi Ranperda Menara Telekomunikasi- si Bersama	Sosialisasi Ranper da dan Perda Menara Telekomu nikasi Bersama	384.825.000		-	-	-	-
23.	Operasi Pemberian Izin Kantor Cabang dan Lokal Pelayanan Operator	Terlaksananya Operasi Pemberian Izin Kantor Cabang dan Lokal Pelayanan Operator		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000
24.	Operasi Pemberian Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Ko atau Jalan Provinsi	Terlaksananya Operasi Pemberian Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Ko atau Jalan Provinsi		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000

25	<i>Operasi Pemberian Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Teknis terhadap permohonan ijin penyelenggara televisi</i>	<i>Terlaksananya Operasi Pemberian Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Teknis terhadap permohonan ijin penyelenggara televise</i>		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000
26	<i>Pembuatan Mapping penataan menara di Sumatera Utara</i>	<i>Tersedianya Pembuatan Mapping penataan menara di Sumatera Utara</i>		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000
27	<i>Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga</i>		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000
28	<i>Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap pemohon ijin penyelenggaraan penyiaran</i>	<i>Terevaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap pemohon ijin penyelenggaraan penyiaran</i>		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000
29	<i>Operasi Pengawasan jasa telekomunikasi</i>	<i>Terlaksananya Operasi Pengawasan jasa telekomunikasi</i>		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000
30	<i>Operasi pengawasan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat postel skala provinsi</i>	<i>Terlaksananya Operasi pengawasan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat postel skala provinsi</i>		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000
31	<i>Operasi penertiban jasa titipan untuk kantor cabang</i>	<i>Terlaksananya Operasi penertiban jasa titipan untuk kantor cabang</i>		-	-	50,000,000	57,500,000	66,125,000
32	<i>Pemetaan Bidang Pos dan Telekomunikasi</i>	<i>Terlaksananya Pemetaan Data Tentang Telekomunikasi Menara</i>		-	-	100.785.825	115.903.700	133.289.300

33.	<i>Digitalisasi data</i>	<i>Terlaksananya Digitalisasi data</i>	-	-	-	46.381.800	53.339.100	61.400.000
34.	<i>Pembuatan Buku Saku Standar Operasional Perizinan</i>	<i>Terlaksananya Pembuatan Buku Saku Standar Operasional Perizinan</i>	-	-	-	36.750.000	42.262.500	48.601.900
35.	<i>Pendataan Bidang Pos Dan Telekomunikasi</i>	<i>Terlaksananya pendataan Telekomunikasi khusus Non Spektrum Frekwensi Radio cakupan Provinsi dan Jaringan tetap local wireline (end to end) cakupan provinsi</i>	-	-	-	-	110.000.000	126.500.000
36.	<i>Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional Pos Dan Telekomunikasi</i>	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional Pos Dan Telekomunikasi</i>	-	-	-	-	65.000.000	74.750.000
37.	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pos Dan Telekomunikasi</i>	<i>Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pos Dan Telekomunikasi dan Standar Operator Prosedur (SOP) pelayanan perizinan/non perizinan</i>	-	-	-	-	81.000.000	93.150.000
38.	<i>Pameran Filateli</i>	<i>Terlaksananya Pameran Filateli</i>	-	-	-	-	185.000.000	212.750.000
39.	<i>Monitoring Teknis Untuk Rekomendasi bidang Pos Dan Telekomunikasi</i>	<i>Terlaksananya Monitoring dan evaluasi izin bidang Pos dan Telekomunikasi</i>	-	-	-	-	79.500.000	91.425.000
40.	<i>Monitoring Perizinan Bidang Pos Dan Telekomunikasi</i>	<i>Terlaksananya Monitoring dan evaluasi izin dibidang Pos dan Telekomunikasi</i>	-	-	-	-	79.500.000	91.425.000
41.	<i>Pembuatan Banner, Poster, Stiker dibidang Pos Dan Telekomunikasi</i>	<i>Adanya banner, poster, Stiker di bidang Pos dan Telekomunikasi</i>	-	-	-	-	26.000.000	29.900.000

42.	Rapat Kordinasi dengan Kab/Ko	Terlaksananya Rapat Kordinasi dengan Kab/Ko	-	-	-	-	40.000.000	46.000.000
43.	Biaya Operasional M-Plik	Tersedianya Biaya Operasional M-Plik	-	-	-	-	362.400.000	416.760.000
44.	Pengadaan Mobil Operasional Lapangan dan Monitoring M-Plik Postel	Adanya Mobil Operasional Lapangan dan Monitoring M-PLIK Postel	-	-	-	-	296.350.000	340.802.500
45.	Rapat Kordinasi dengan Kab/Ko Dalam rangka sosialisasi M- Plink	Tersosialisasinya M-PLIK ke Kab/Ko	-	-	-	-	11.615.000	-
46	Pelatihan Operasional M-Plik	Meningkatnya Keterampilan Pegawai dalam Mengoprasionalkan M-PLIK	-	-	-	-	16.215.000	-
47	Pengiriman M-PLIK ke 6 Lokasi Kab/Ko	Terlaksananya Pengiriman M-PLIK ke 6 Lokasi Kab/K	-	-	-	-	136.930.000	-
48	Digitalisasi Universal Obligasi, Petra dan KIM	Tersedianya data uso, petra dan KIM	-	-	-	-	77.334.800	-
49	Rapat evaluasi Pelayanan Umum (USO/KPU)	Terlaksananya Rapat evaluasi Pelayanan Umum (USO/KPU)	-	-	-	-	-	21.540.150
50	Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Pos dan Telekomunikasi	Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	158.029.900
51	Pameran Universal Service Obligation / kewajiban Pelayanan Universal (USO / KPU) dan Jasa Titipan	Terlaksanya Pameran Universal Service Obligation / kewajiban Pelayanan Universal (USO / KPU) dan Jasa Titipan	-	-	-	-	-	55.465.400
52	Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembangunan Kewajiban Universal di Bidang Telekomunikasi	Termonitoring dan terevaluasi rangka Pembangunan Kewajiban Universal di Bidang Telekomunikasi	-	-	-	-	47.800.000	47.800.000

53	<i>Pelayanan Informasi melalui M-Plik ke Kab</i>	<i>Tersedianya Pelayanan Informas</i>		-	-	-	-	<i>342.196.400</i>
54	<i>Digitalisasi Data</i>	<i>Adanya pendataan data</i>		-	-	-	<i>45.000.000</i>	<i>48.020.000</i>
55	<i>Digitalisasi Jasa Titipan</i>	<i>Adanya pendataan jasa titipan</i>		-	-	-	-	<i>65.000.000</i>

BAB-6

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA FUNGSI DAN SASARAN RPJMD

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM	SASARAN	KONDISI 2008	TARGET PENCAPAIAN				
					2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
I.		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							
1.		<i>Pementasan Media Tradisional di televisi</i>			36,5%	49%	64%	79%	100%
2.		<i>Pagelaran Pertunjukan Rakyat di Kab/Ko</i>			17,3%	34%	53%	74%	100%
3.		<i>Pagelaran Pertunjukan Rakyat tingkat Nasional</i>			20%	-	43%	58%	100%
4.		<i>Lomba Kelompok Informasi Masyarakat</i>			-	20%	35%	50%	100%
5.		<i>Siaran Keliling</i>			15%	32%	47%	62%	100%
6.		<i>Pekan Raya Sumatera Utara</i>			12%	27%	42%	57%	100%
7.		<i>Infokom Expo mendukung berbagai kegiatan Pemprov</i>			20%	-	35%	50%	100%
8.		<i>Sosialisasi tahunan pemerin tahan Gubsu dan Wagubsu</i>			19%	34%	52%	73%	100%
9.		<i>Penerbitan Kalender Pemprov</i>			15%	32%	47%	62%	100%
10.		<i>Penyusunan Materi dan Penerbitan Tabloid Transisi</i>			13%	31%	46%	61%	100%
11.		<i>Iklan Layanan Masyarakat dan Advertorial</i>			-	20%	35%	50%	100%
12.		<i>Dialog Interaktif di Radio</i>			15%	32%	47%	62%	100%
13.		<i>Dialog Interaktif di TV</i>			15%	32%	53%	73%	100%
14.		<i>Pembinaan Media Massa</i>			18%	36%	51%	66%	100%
15.		<i>Pemprov menjawab di RRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%
16.		<i>Aspirasi Publik di RRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%
17.		<i>Ayo Tanya Dokter di RRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%

18.		<i>Anak Cerdas Kita di RRI</i>			16%	32%	47%	62%	100%
19.		<i>Pemprovsu menjawab di TVRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%
20.		<i>Sumut dalam Berita di TVRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%
21.		<i>Mimbar Agama Islam di TVRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%
22.		<i>Mimbar Agama Kristen di TVRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%
23.		<i>Mimbar Agama Budha/Hindu di TVRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%
24.		<i>Siaran Tunda di TVRI</i>			17%	34%	49%	64%	100%
25.		<i>Siaran Langsung (OB Van di TVRI)</i>			17%	34%	49%	64%	100%
26.		<i>Gerak Pembangunan Sumut yg meliputi Kab/Ko</i>			-	20%	35%	50%	100%
27.		<i>Pertemuan koordinasi Gubsu dengan pimpinan surat kabar, muspida dan pejabat Pemprov</i>			20%	32%	47%	62%	100%
28.		<i>Sosialisasi Peraturan Per undang-undangan Bidang Kominfo</i>			-	-	29%	62%	100%
29.		<i>Kepesertaan Bintek SKDI</i>			-	-	48%	63%	100%
30.		<i>Sosialisasi/Publikasi melalui Media Luar Ruang (Media Out Door) pada Kegiatan Hari-Hari Besar</i>			-	20%	35%	50%	100%
31.		<i>Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka hari jadi Pemprov</i>			-	19%	41%	68%	100%
32.		<i>Ekspose Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara</i>			-	19%	35%	54%	100%
33.		<i>Dialog Pembangunan Sumatera Utara di Televisi</i>			-	19%	41%	68%	100%
34.		<i>Dialog tentang Pembangunan Sumatera Utara bersama Kelompok Strategis</i>			-	19%	35%	54%	100%
35.		<i>Dialog Gubsu bersama Mahasiswa</i>			-	19%	41%	68%	100%
36.		<i>Sosialisasi UU No.14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Informasi Transaksi Elektronik (ITE)</i>			-	19%	41%	68%	100%
37.		<i>Pementasan Pertunjukan Rakyat di kab/ko</i>			-	-	29 %	62%	100 %

38.		<i>Lomba Pementasan Media Tradisional di Kab/ko</i>			-	-	29 %	62%	100 %
39.		<i>Ragam serumpun</i>			-	-	29 %	62%	100 %
40.		<i>Satu jam bersama DPRD Sumut di TVRI</i>			-	-	29 %	62%	100 %
41		<i>.Pertemuan Pekan Informasi Nasional</i>			-	-	29 %	62%	100 %
42		<i>Pertemuan Kelompok Informasi Masyarakat dan Media Tradisional Wilayah Barat dan Nasional</i>			-	-	29 %	62%	100 %
43		<i>Sosialisasi Pemetaan FK Metra / KIM di Kab/Ko</i>			-	-	-	47 %	100 %
44		<i>Sosialisasi Komunikasi dan Informasi Pra Pilkada Gubsu/Wagubsu memalui Televisi dan Radio</i>			-	-	-	47 %	100 %
45		<i>Penerbitan Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumatera Utara</i>			-	-	-	47 %	100 %
46		<i>Sosialisasi Komunikasi dan Diseminasi Informasi Pra Pilkada Gubsu / Wagubsu di Kab / Ko</i>			-	-	-	47 %	100 %
47		<i>Sosialisasi Pilgubsu melalui Media Cetak</i>			-	-	-	47 %	100 %
48		<i>Sosialisasi Pilgubsu melalui Media Outdoor</i>			-	-	-	47 %	100 %
49		<i>Pertemuan Komunikasi dan Informasi antara Muspida Plus se-Sumatera Utara dalam Rangka Pra Pilkada Gubsu / Wagubsu</i>			-	-	-	47 %	100 %
50		<i>Talkshow Gubsu Mendengar Rakyat di Radio</i>			-	-	-	47 %	100 %
51		<i>Talkshow Sumut Membangun di Radio</i>			-	-	-	47 %	100 %
52		<i>Talkshow dalam rangka HUT RI Provsu di Radio</i>			-	-	-	47 %	100 %
53		<i>Talkshow Kaleidoskop Akhir di Radio</i>			-	-	-	47 %	100 %
54		<i>Talkshow Program Prioritas APBD TA. 2012 Provsu</i>			-	-	-	47 %	100 %
55		<i>Talkshow Menyambut Ramadhan dan Hari Raya di</i>			-	-	-	47 %	100 %

		<i>Radio</i>							
56		<i>Iklan Layanan Masyarakat</i>			-	-	-	47 %	100 %
57		<i>Pementasan Pertunjukan Rakyat Media tradisional di Kab/ko</i>							
58		<i>Lomba Pementasan Media Tradisional di kab/Ko</i>							
59		<i>Tabloid transisi</i>			-	-	-	48 %	100 %
60		<i>Seminar Nasional komunikasi Humanis menghindari konflik menuju Sumut kondusif</i>			-	-	-	100 %	-
61		<i>Pembuatn steager</i>			-	-	-	100 %	-
62		<i>Penerbitan Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumut</i>			-	-	-	100 %	-
		Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan antar Lembaga							
1.		<i>Kajian Issue Krusial</i>			-	20%	35%	50%	100%
2.		<i>Jumpa Publik</i>			20%	-	35%	50%	100%
3.		<i>Penanganan Unjuk Rasa</i>			22%	38%	53%	68%	100%
4.		<i>Diskusi Panel/Sarasehan</i>			18%	34%	49%	64%	100%
5.		<i>Roadshow dan forum dialog dalam rangka desiminasi informasi ke Kab/Kota</i>			-	20%	35%	50%	100%
6.		<i>Jumpa Pers Instansi</i>			11%	39%	54%	69%	100%
7.		<i>Coffee Morning</i>			18%	34%	49%	64%	100%
8.		<i>Dokumentasi, Pelaporan dan perpustakaan kegiatan Dinas Kominfo</i>			12%	29%	50%	73%	100%
9.		<i>Pertemuan Infokom/Humas Pemprovsu</i>			19%	35%	50%	65%	100%
10.		<i>Temu Konsultasi Bakohumas</i>			34%	49%	64%	79%	100%
11.		<i>Temu konsultasi KIM dan FK. Metra</i>			-	-	29%	44%	100%
12.		<i>Temu konsultasi Kemitraan Asosiasi Jaringan Internet</i>			-	-	29%	44%	100%
13.		<i>Temu Konsultasi anggota Advertising dan Event Organizer</i>			-	-	29%	44%	100%

14.		<i>Kepesertaan Bintek Kelem bagaan</i>			-	-	33%	48%	100%
15.		<i>Operasional sekretariat tim monitoring hemat energi</i>			31%	45%	60%	75%	100%
16.		<i>Peningkatan Capacity Building utk penguatan bagi Juru foto dan juru kamera di lingkungan Humas dalam rangka peneran UU No.14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)</i>			-	12%	34%	61%	100%
17.		<i>Workshop Pendidikan Pemerintah bagi wartawan</i>			-	19%	41%	68%	100%
18.		<i>Bantuan untuk operasional Iklan Jurnalis Televisi Indonesia</i>			-	16%	35%	58%	100%
19.		<i>Forum dialog tentang Pembangunan Sumatera Utara dgn wartawan asal Sumut di Jakarta</i>			-	19%	41%	68%	100%
20.		<i>Peningkatan Capacity Building utk penguatan Juru Bicara Pemerintah (CIO) berbasis teknologi informasi</i>			-	19%	41%	68%	100%
21.		<i>Dokumentasi kegiatan Gubsu dan Wagubsu</i>			-	19%	41%	68%	100%
22.		<i>Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi Melalui Media Informasi</i>			21 %	37 %	56 %	78 %	100 %
23		<i>Pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional, Tingkat Wilayah Pusat dan Nasional</i>			-	-	29 %	62%	100 %
24		<i>Operasional Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provsu</i>			-	-	-	47 %	100%
25		<i>Pekan Bakohumas</i>			-	-	-	47 %	100%
26		<i>Workshop Kehumasan</i>			-	-	-	47 %	100%
27		<i>Pertemuan Humas kab/ko dengan jurnalis daerah</i>			-	-	-	47 %	100%
28		<i>Pencerdasan Politik bagi Jurnalis guna mendukung Media Massa mensukseskan Tahun Politik Sumut 2013</i>			-	-	-	-	100%
29		<i>Pembekalan Tata Kepemimpinan Jurnalis dalam rangka</i>			-	-	-	-	100%

30		<i>mendukung Good Governments</i> <i>Pembekalan Peran Media Massa dalam memberhasikan program – program Strategis Sumatera mendukung Pembangunan Nasional</i>							100%
III.		Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik							
1.		<i>Pusat Informasi Publik</i>			19%	35%	50%	65%	100%
2.		<i>Web to SMS Layanan Informasi Pembangunan</i>			20%	-	35%	50%	100%
3.		<i>Biaya berlangganan LKBN Antara</i>			31%	47%	62%	77%	100%
4.		<i>Pengembangan dan Pemu- tahiran Sumut-on line</i>			20%	36%	51%	66%	100%
5.		<i>Peningkatan Kualitas Layan an Informasi melalui Website</i>			10%	28%	43%	58%	100%
6.		<i>Pembuatan Audio Visual LKPJ Gubsu</i>			20%	36%	51%	66%	100%
7.		<i>Pembinaan dan pengem- bangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika</i>			11%	33%	48%	63%	100%
8.		<i>Monitoring dan Evaluasi Server</i>			4%	23%	38%	53%	100%
9.		<i>Pemakaian Internet Access dan Lokal Link dari Indosat ke Diskominfo Provsu</i>			16%	32%	47%	62%	100%
10.		<i>Pengadaan dan Instalasi radiolink untuk transmisi data dan voice di sejajaran pemprovsu</i>			-	-	100%	-	-
11.		<i>Kepesertaan Bintek Aplikasi dan Telematika</i>			-	-	33%	62%	100%
12.		<i>Koordinasi pembangunan Jaringan ICT</i>			-	-	29%	62%	100%
13.		<i>Pembukaan Internet Access di 33 Kab/Ko</i>			-	-	-	47%	50%
14.		<i>Biaya berlangganan Jaring an Internet dan Hot Spot</i>			21%	37%	52%	67%	100%
15.		<i>Peningkatan SDM Bidang Teknologi dan Informasi</i>			-	-	32%	64%	100%
16.		<i>Pembangunan Jaringan Internet (Layanan VPN-IP)</i>			-	-	100%	-	-
17.		<i>Bimbingan Teknis Penggunaan Web Internal</i>			-	-	31%	66%	100%

18.		Sosialisasi Pembangunan Pemprov dan DPRDSU melalui Perum Antara			-	-	29 %	62%	100 %
19.		Pembuatan Video Profile Sumut			-	-	29 %	62%	100 %
20.		Pembangunan Sarana dan Prasarana Video Confrence			-	-	29 %	62%	100 %
21		Biaya Abodemen Jaringan Intranet			-	-	-	47 %	100%
22		Forum Komunikasi E-Government Provinsi dan Kab			-	-	-	47 %	100%
23		Bimtek Penggunaan Open source software (OSS)			-	-	-	47 %	100%
24		Monitoring dan Evaluasi Server, Peralatan Multimedia dan Jaringan			-	-	-	47 %	100%
25		Operasional Publikasi Informasi PIP melalui Media Center			-	-	-	47 %	100%
26		Pengembangan dan Pemuktahiran Website Dinas Kominfo			-	-	-	47 %	100%
27		Pembuatan Video 7 Program Prioritas Provsu			-	-	-	47 %	100%
28		Biaya Operasional Komisi Informasi Sumatera Utara			-	-	-	47 %	100%
29		Pengadaan Server Induk			-	-	-	47 %	100%
30		Peningkatan pelayan website Diskominfo Provsu			-	-	-	100%	-
31		Pembuatan Pergub Tentang E-Goverment			-	-	-	47 %	100%
32		Upgrade Bandwith intranet 45 SKPD			-	-	-	100%	-
33		Seminar Aplikasi dan Telematika			-	-	-	100%	-
34		Pembangunan ruang Server dan Perangkat pendukung			-	-	-	100%	-
35		Masterplan e- government Pemerintah Sumut			-	-	-	100%	-
36		Seminar Aplikasi dan Telematika			-	-	-	100%	-

IV.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi							
1.	Operasional pemberi izin bidang pos dan telekomunikasi			-	20%	35%	50%	100%
2.	Penertiban di bidang postel			-	20%	35%	50%	100%
3.	Bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi pelayanan, kinerja operasi dan pelayanan universal di skala wilayah			-	-	29%	44%	100%
4.	Rapat evaluasi rutin pos dan telekomunikasi			-	20%	35%	50%	100%
5.	Penyusunan buku peraturan dan perundang-undangan pos dan telekomunikasi			-	100%	-	-	-
6.	Koordinasi pembangunan kewajiban layanan universal telekomunikasi (USO) di kab/ko			-	20%	35%	50%	100%
7.	Penerbitan tabloid pos dan telekomunikasi			-	20%	35%	50%	100%
8.	Pembelian peralatan GPS			-	100%	-	-	-
9.	Pembelian mobil operasional postel			-	-	100%	-	-
10.	Rapat koordinasi dengan mitra kerja media massa postel, asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya			-	21%	45%	60%	100%
11.	Konsultasi teknis NSPK postel dan rapat koordinasi postel			-	20%	35%	50%	100%
12.	Kepesertaan Bintek Postel			-	-	33%	62%	100%
13.	Koordinasi Penataan Menara Komunikasi Kab/Ko			100%	-	-	-	-
14.	Temu konsultasi organisasi Amatir dan Radio Antar Penduduk			-	-	29%	62%	100%
15.	Temu konsultasi Pertelevisian dan Radio			-	-	29%	62%	100%
16.	Temu konsultasi Pos dan Jasa titipan			-	-	29%	62%	100%
17.	Temu konsultasi Provider dan Operator			-	-	29%	62%	100%

18.		<i>Koordinasi Operasional Radio Amatir dan antar Penduduk</i>			-	-	29%	62%	100%
19.		<i>Koordinasi mengatasi Blankspot Siaran TV dan Radio</i>			-	-	29%	62%	100%
20.		<i>Koordinasi Pembangunan PO Box dan Jasa Titipan di setiap Desa</i>			-	-	29%	62%	100%
21.		<i>Pembuatan Ranperda Menara Telekomunikasi Bersama</i>			100%	-	-	-	-
22.		<i>Sosialisasi Ranperda Menara Telekomunikasi Bersama</i>			100%	-	-	-	-
23		<i>Operasi Pemberian Izin Kantor Cabang dan Lokal Pelayanan Operator</i>			-	-	29%	62%	100%
24		<i>Operasi Pemberian Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi Lintas Kab/Ko atau Jalan Provinsi</i>			-	-	29%	62%	100%
25		<i>Operasi Pemberian Rekomendasi Persyaratan Administrasi dan Kelayakan Data Teknis terhadap permohonan ijin penyelenggara televisi</i>			-	-	29%	62%	100%
26		<i>Pembuatan Mapping penataan menara di Sumatera Utara</i>			-	-	29%	62%	100%
27		<i>Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di daerah perbatasan dengan negara tetangga</i>			-	-	29%	62%	100%
28		<i>Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap pemohon ijin penyelenggaraan penyiaran</i>			-	-	29%	62%	100%
29		<i>Operasi Pengawasan jasa telekomunikasi</i>			-	-	29%	62%	100%
30		<i>Operasi pengawasan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat postel skala provinsi</i>			-	-	29%	62%	100%

31		Operasi penertiban jasa titipan untuk kantor cabang			-	-	29%	62%	100%
		Pemetaan Bidang Pos dan Telekomunikasi			-	-	29%	62%	100%
33.		Digitalisasi data			-	-	29%	62%	100%
34		Pembuatan Buku Saku Standar Operasional Perizinan			-	-	29%	62%	100%
35		Pendataan Bidang Pos Dan Telekomunikasi			-	-	-	47 %	100%
36		Koordinasi dan Konsultasi Teknis Operasional Pos Dan Telekomunikasi			-	-	-	47 %	100%
37		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pos Dan Telekomunikasi			-	-	-	47 %	100%
38		Pameran Filateli			-	-	-	47 %	100%
39		Monitoring Teknis Untuk Rekomendasi bidang Pos Dan Telekomunikasi			-	-	-	47 %	100%
40		Monitoring Perizinan Bidang Pos Dan Telekomunikasi			-	-	-	47 %	100%
41		Pembuatan Banner, Poster, Stiker dibidang Pos Dan Telekomunikasi			-	-	-	47 %	100%
42		Rapat Kordinasi dengan Kab/Ko Dalam rangka sosialisasi M-Plink			-	-	-	100%	-
43		Biaya Operasional M-Plik			-	-	-	47 %	100%
44		Pengadaan Mobil Operasional Lapangan dan Monitoring M-Plik Postel			-	-	-	47 %	100%
45		Rapat Kordinasi dengan Kab/Ko			-	-	-	47 %	100%
46.		Pelatihan Operasional M-Plik			-	-	-	100%	-
47.		Pengiriman M-PLIK ke 6 Lokasi Kab/Ko			-	-	-	100%	-
48		Digitalisasi Universal Obligasi, Petra dan KIM						100%-	-
49		Rapat evaluasi Pelayanan Umum (USO/KPU)			-	-	-	100%	-

50		<i>Pembekalan Peraturan Perundang-undangan Pos dan Telekomunikasi</i>			-	-	-	47 %	100%
51		<i>Pameran Universal Service Obligation / kewajiban Pelayanan Universal (USO / KPU) dan Jasa Titipan</i>			-	-	-	100%-	-
52		<i>Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pembangunan Kewajiban Universal di Bidang Telekomunikasi</i>			-	-	-	47 %	100%
53		<i>Pelayanan Informasi melalui M-Plik ke Kab/Ko</i>			-	-		47 %	100%
54		<i>Digitalisasi Data</i>					29%	62%	100%
55		<i>Digitalisasi Jasa Titipan</i>			-	-	29%	62%	100%

BAB-7

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Penyusunan Program serta pelaksanaan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013.

Dokumen Rencana Strategis yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan organisasi memuat tentang misi, visi tujuan dan program/kegiatan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman yang dihadapi.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2009 – 2013.

Medan,

2009

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Drs. H. EDDY SYOFIAN, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19640409 198903 1 005